



Analisis Konflik Pembangunan Pabrik Semen di Pegunungan Kendeng Menurut Prespektif Hukum dan Masyarakat

Aprilia Wahidatul Hasanah¹. Anggita Oktaviana²

Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang

Jalan Kampus Timur, Sekaran, Kec. Gunung Pati, Kota Semarang, Jawa Tengah, 50229

Abstract

Received: 2 September 2024
Revised: 6 September 2024
Accepted: 29 September 2024

The Kendeng Mountains have rich limestone expanses and abundant groundwater sources. Based on Governor's Decree Number 660.1/17 of 2012 concerning Environmental Permits for Mining Activities of PT. Semen Gresik which changed its name to PT. Semen Indonesia since 2012 they have been able to carry out mining in the Kendeng Mountains. This is a problem between the government wanting to utilize existing resources for commercial purposes while the people who are affected by these activities choose the location as a conservation location. So the community took steps to address their concerns about the decline in air quality in the area by filing a lawsuit. This writing aims to describe the conflict over the rejection of mining and the construction of a cement factory in Kendeng and to examine the impacts resulting from these mining activities.

Keywords: *conflict, impact, Kendeng mountains*

(*) Corresponding Author:

wahidaapril@students.unnes.ac.id, anggitaoktaviana@students.unnes.ac.id

How to Cite: Hasanah, A., & Oktaviana, A. (2024). Analisis Konflik Pembangunan Pabrik Semen di Pegunungan Kendeng Menurut Prespektif Hukum dan Masyarakat. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(23), 1321-1331. Retrieved from <https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/9267>

PENDAHULUAN

Saat ini, pembangunan infrastruktur tidak bisa dipisahkan dari proses pergerakan suatu bangsa ke era yang lebih kontemporer. Tentu saja, pemerintah perlu membangun sarana infrastruktur yang memadai untuk melaksanakan program tersebut. Kemajuan Berbagai bahan konstruksi dibutuhkan untuk infrastruktur, termasuk bahan baku untuk semen. Sehubungan dengan program pemerintah dalam Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) tahun 2011–2025, kebutuhan semen negara ini meningkat sejak tahun 2012. Sumber daya yang paling banyak dieksploitasi adalah sumber daya pertambangan, kelautan dan kehutanan, yang mana Pemerintah Indonesia menggunakannya sebagai modal untuk meningkatkan pendapatan nasional. Namun, pelabuhan, jalan raya, bandara, dan infrastruktur lainnya di suatu negara merupakan penanda penting untuk meningkatkan distribusi barang dan jasa.

Kebutuhan untuk mengembangkan infrastruktur dipengaruhi oleh pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan ini menyebabkan kebutuhan pasokan bangunan termasuk pasir semen dan bahan bangunan lainnya terus meningkat. Tentu saja, Pulau Jawa, yang merupakan pusat pemerintahan dan wilayah padat penduduk, memiliki tingkat perkembangan tertinggi. Pabrik semen dan aktivitas pertambangan banyak terdapat di Pulau Jawa. Pembangunan pabrik di beberapa daerah terkadang juga menimbulkan berbagai kendala dan permasalahan. Pengusaha pertambangan lebih sering menasar kawasan karst karena kapurnya dapat digunakan dalam pembuatan semen. Salah satu cara penambangan batu kapur yang diduga dapat memenuhi kebutuhan adalah melalui industri. Meski demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa hal tersebut akan mengubah medan dan dapat membahayakan ekologi jika disalahgunakan oleh penambangan skala besar. Pada akhirnya hal ini akan merugikan masyarakat. Karena apa yang dirasakan

dan diharapkan dapat memberikan keuntungan, namun pada kenyataannya justru menjadi kerugian.

Industri semen Indonesia akan tumbuh seiring dengan meningkatnya permintaan bahan baku semen. Namun tidak semua upaya untuk mengembangkan pertambangan dan industri dapat dilakukan dengan sukses; banyak dari kegiatan ini menimbulkan konflik di kalangan masyarakat lokal. Salah satu hal yang memicu konflik di masyarakat adalah kekhawatiran akan dampak industri terhadap pertanian dan lingkungan sekitar. Perselisihan tersebut salah satunya muncul ketika pengusaha semen PT Semen Indonesia (kini bernama PT Semen Gresik) hendak membangun sebuah pabrik yang berlokasi di Pegunungan Kendeng, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati. Banyak pihak yang menolak dan menentang pembangunan pabrik semen ini, termasuk masyarakat adat Sedulur Sikep yang menilai dengan adanya pendirian pabrik semen yang berlokasi di Pegunungan Kendeng, akan merugikan lingkungan dan membahayakan cara hidup mereka.

Zona karst utama terdapat di Pegunungan Kendeng Utara yang membentang dari Kabupaten Pati di Jawa Tengah hingga Kabupaten Lamongan di Provinsi Jawa Timur. Wilayah tersebut memiliki sumber daya alam melimpah selain tanah liat dan batuan kapur yang digunakan untuk dapat memproduksi semen. Daerah karst di Pegunungan Kendeng Utara memiliki kegunaan sebagai spons alami, menyimpan air dan memberi kota-kota terdekat akses terhadap pasokan penting mata air. Hal ini juga memberikan manfaat yaitu dapat membantu mengurangi kemungkinan kekeringan selama musim kemarau selain disisi lain juga dapat memenuhi kebutuhan air sehari-hari pertanian. Namun ekstraksi batu kapur dan tanah liat melalui penambangan membahayakan pasokan air tanah, dapat mengancam kehidupan masyarakat di sekitarnya dan lahan-lahan pertanian. Jika ditinjau dari sisi lain, apabila pasokan air tanah dilindungi maka akan dapat membatasi penggunaan tanah liat dan batu kapur untuk penambangan.

Adanya rencana terkait pembangunan pabrik semen yang berlokasi di daerah Pegunungan Kendeng telah membuat penduduk setempat khawatir, karena mereka menganggapnya sebagai ancaman besar bagi alam. Mereka berpikir bahwa mata pencaharian petani, ekosistem alam, dan sumber air akan terdampak oleh pabrik semen. Mereka percaya bahwa operasi penambangan yang akan dilakukan di kawasan karst 1 dapat memberikan dampak negatif terhadap ekosistem. Peran hidrologis kawasan ini sebagai pengatur utama sistem air permukaan dan bawah permukaan akan hilang dengan hilangnya bukit-bukit karst. Oleh karena itu, ada kemungkinan bahwa ekstraksi Pegunungan Kendeng akan memiliki efek yang sama pada semua kota di sekitarnya. Khususnya, masyarakat di wilayah Pati, yang sumber pendapatan utamanya adalah pertanian. Pabrik semen dapat menjadi ancaman bagi kualitas hidup masyarakat sekitar dan kelangsungan ekonomi.

Warga resah dengan usulan PT Sahabat Mulia Sakti (PT SMS) untuk membangun pabrik semen di Kabupaten Pati. Dua ribu enam ratus hektare lahan pertambangan yang masih tergolong kawasan hutan harus dimanfaatkan untuk pembangunan pabrik tersebut. Kawasan karst di Kabupaten Pati menawarkan manfaat yang signifikan bagi masyarakat setempat dan juga memiliki arti penting secara ekologis. Mata air pegunungan karst merupakan sumber air utama bagi kebutuhan sehari-hari masyarakat dan pertanian, selain dimanfaatkan untuk usaha pertanian dan perkebunan. Seperti diketahui, kawasan karst kategori satu di kawasan Pati berfungsi sebagai reservoir alami dan resapan air bagi kawasan pemukiman di sekitarnya. Masyarakat yang tinggal di sekitar Pegunungan Kendeng khawatir dengan dampak

pembangunan pabrik semen terhadap ekologi hutan dan ekosistem sekitar mereka mengingat statistik tersebut. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Pasal 12 nomor 1456/K/20/MEM/2000 yang menyatakan bahwa kawasan karst khususnya yang termasuk dalam kategori I mempunyai fungsi penting sebagai daerah resapan air dan penyimpan mata air, memberikan dukungan atas penolakan mereka terhadap rencana pembangunan pabrik semen di Kabupaten Pati.

Berdasarkan penelitian yang diterbitkan pada tahun 2015 oleh Pusat Studi Keamanan dan Perdamaian (PSKP) UGM, perbedaan tujuan antara PT Semen Indonesia dan anggota JMPPK berujung pada perselisihan berkepanjangan yang berlangsung dari tahun 2012 hingga 2015. Konflik ini bermula pada tahun 2012 ketika PT Semen Indonesia mendirikan pabriknya di kawasan kehutanan Pegunungan Kendeng, Kecamatan Bulu. Akibatnya, konflik meningkat selama tiga tahun berturut-turut. Konflik fase 1 terjadi antara tahun 2012 dan 2014, dan Desa Tegaldowo masih terlihat tanda-tanda peperangan tersebut. Ketegangan terlihat jelas saat ini, meski belum mencapai puncaknya. Konflik tahap kedua dimulai pada tanggal 15 Juni 2014, ketika sekitar 20 perempuan menghentikan jalan sebagai bentuk pembangkangan terbuka yang dilakukan oleh anggota JMPPK setempat, sehingga menghalangi akses ke pabrik semen. Peristiwa ini menandakan dimulainya pertikaian yang lebih terbuka dan intens antara PT Semen Indonesia dan masyarakat sekitar, yang memprotes dampak negatif sosial dan lingkungan dari keberadaan pabrik semen di dekatnya. Bentrokan ini menjadi pengingat akan adanya perbedaan besar antara kepentingan lingkungan hidup dan ekonomi, serta pentingnya peran masyarakat dalam membela hak-hak mereka.

Beberapa bulan kemudian, khususnya pada tanggal 26-27 September 2014, muncul aksi yang menandai dimulainya konflik tahap 3. Aksi ini melibatkan pemblokiran serta penggunaan alat bambu runcing dan lesung sebagai representasi petani. Masyarakat Samin yang tergabung dalam Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JMPPK) kini membantu warga Pati dan Rembang menangani PT Semen Indonesia dan PT Indocement di Kecamatan Kayen dan Tambakromo, Pati, Jawa Tengah. Konflik yang terjadi di sekitar pabrik semen di Kendeng memiliki kemiripan yang mencolok dengan konflik sosial di masa lalu baik di Indonesia maupun di tingkat global, dengan alasan yang dapat diidentifikasi dan dapat dijelaskan melalui serangkaian kerangka teori tertentu. Oleh karena itu diperlukan kerangka berpikir untuk memahami teori tersebut dan menarik kesimpulan tentang cara menangani konflik. Lebih luas lagi, pemahaman ini akan menjadi panduan untuk merumuskan kebijakan yang akan menghentikan timbulnya konflik dalam eskalasi tertentu di masa depan.

Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas, penulis mengambil rumusan masalah yaitu :

1. Bagaimana esensi konflik atau “Pro dan Kontra” yang terjadi di dalam sekelompok masyarakat terhadap pembangunan pabrik semen di pegunungan kendeng?
2. Apa dampak yang ditimbulkan dari pembangunan pabrik semen di pegunungan kendeng?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris yang kadang disebut penelitian lapangan karena mengkaji bagaimana hukum yang berlaku diterapkan dan apa yang sebenarnya terjadi dalam masyarakat. Penelitian hukum tentang penerapan atau pelaksanaan ketentuan hukum normatif yang berlaku pada setiap peristiwa hukum atau kejadian tertentu di masyarakat yang dikenal dengan penelitian yuridis empiris.

Dengan kata lain, penelitian dilakukan terhadap situasi atau kondisi dunia nyata yang ada di masyarakat dengan tujuan untuk mempelajari dan memperoleh fakta dan data yang diperlukan. Setelah data yang diperlukan dikumpulkan, masalah yang dihadapi diidentifikasi. Pada akhirnya menghasilkan solusi masalah.

PEMBAHASAN

1. Esensi Konflik Atau “Pro Dan Kontra” Yang Terjadi Di Dalam Sekelompok Masyarakat Terhadap Pembangunan Pabrik Semen Di Pegunungan Kendeng

Pegunungan kendeng merupakan daerah yang memiliki fenomena alam yang unik berbentuk hamparan perbukitan kapur. Kekayaan alam ini dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai lapangan pekerjaan dan dapat mensejahterakan rakyat sekitar pegunungan Kendeng. Munculnya isu yang didengar oleh masyarakat terkait penambangan kapur di pegunungan Kendeng menimbulkan konflik dalam masyarakat. Penolakan yang dilakukan masyarakat bukan tanpa alasan, melainkan masyarakat beranggapan bahwa penambangan yang akan dilakukan tersebut dapat merusak lingkungan sehingga terjadi kekurangan sumber mata air dan kehilangan keanekaragaman hayati. Pertambangan yang dilakukan di lingkungan Kawasan karst memiliki dampak pada menipisnya lapisan tanah yang dapat menahan air, sehingga terdapat kemungkinan akan terjadi kekurangan air pada musim kemarau dan terjadi banjir saat musim penghujan.

Dalam setiap proses pelaksanaan pembangunan di suatu daerah tentu harus berpatokan dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang mana pemanfaatan sumber daya alam daerah merupakan wewenang dari pemerintah daerah agar dapat mengelola dan dilaksanakan seadil adilnya untuk kepentingan masyarakat. Pembangunan pabrik di lingkungan karst menimbulkan konflik karena lingkungan ini memiliki karakteristik topografi dan hidrologi unik yang didominasi oleh drainase bawah tanah. Sistem karst bisa menjadi sangat kompleks dan tidak dapat diprediksi karena berbagai faktor seperti geologi dan hidrologi. Perencanaan dan pengembangan proyek di lingkungan karst memerlukan pendekatan khusus yang bertujuan untuk meminimalkan dampak negatif dari proses berbahaya dan masalah lingkungan. Karena tidak memperhitungkan hal-hal tersebut akan mengakibatkan masalah serius dengan implikasi ekonomi yang besar.

Pegunungan Kendeng sebenarnya sudah menjadi cagar alam yang mana berdasarkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) No.0397 K/40/MEM/2005 dan harus dilindungi dengan dokumentasi yang sesuai. Meski demikian, para penambang di PT Semen Indonesia berupaya keras untuk terus menjalankan penambangan di Pegunungan Kendeng Utara. Hal ini termasuk ketentuan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 128 Tahun 2008 tentang Penetapan Cagar Karst Sukolilo. Pembentukan Cagar Alam Suklilo memiliki dua tujuan yaitu memberikan perlindungan Karst Sukolilo dan sebagai pedoman pengembangan sumber daya pertambangan Karst Sukolilo tanpa mengurangi kawasan lindung.

Dengan pesatnya perkembangan di Indonesia, permintaan pasar semen semakin naik setiap tahunnya. Hal tersebut dapat berdampak pada peningkatan permintaan bahan baku semen. PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk, yang merupakan bagian dari badan usaha milik negara dibidang itu, berencana membangun pabrik semen di kawasan Watuputih. Daerah ini kaya akan karst, bahan baku utama semen, dan PT juga menambang tanah liat serta batu kapur semen indonesia. Hal itulah yang menjadi dasar PT berencana mendirikan pabrik setelah diterbitnya Keputusan Gubernur Jawa Tengah

Nomor 660. 1/17 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Pertambangan, Semen Indonesia kembali melakukan aktivitas penambangan di kawasan Pegunungan Kendeng. Semen Gresik (Persero) Tbk yang sekarang bernama PT. Semen Indonesia mulai tahun 2012. Sejak Keputusan Gubernur dikeluarkan, banyak investor yang mempertimbangkan investasi skala besar di pertambangan di Pegunungan Kendeng.

Komunitas lokal, khususnya perempuan di Pegunungan Kendeng, menyadari perlu adanya dikeluarkan terkait perizinan lingkungan oleh gubernur dan mengambil tindakan untuk menentang penambangan. Masyarakat menyadari bahwa penambangan yang dilakukan di Pegunungan Kendeng akan berdampak pada tata air yang merupakan sumber air sehari-hari dan sumber perekonomian sektor pertanian. Perlawanannya terbuka dan berani serta menjunjung tinggi prinsip-prinsip non-kekerasan. Perlawanan ini didukung oleh berbagai aktor selain aktivis lingkungan hidup. Penyangkalan yang terjadi bersifat publik, dan media menjadi sadar akan penyangkalan tersebut berkat kerja sama para aktivis lingkungan hidup. Berdasarkan masuknya media, protes ini menyebar ke seluruh negeri ke berbagai kelompok masyarakat. Dilihat dari latar belakang penolakannya, mereka sebenarnya adalah warga Kendeng yang berprofesi sebagai petani, berpendidikan rendah, dan kemampuan komunikasi yang terbatas.

Seiring berjalannya waktu, keterampilan komunikasi untuk menyampaikan dan memperoleh informasi tentang pelaku penolakan semakin meningkat. Pada akhirnya, izin lingkungan yang dikeluarkan gubernur menjadi isu besar sehingga menimbulkan perselisihan antara pemerintah dan ilmuwan. Untuk merekonsiliasi perbedaan versi dokumen persetujuan lingkungan hidup yang diterbitkan, studi lingkungan hidup strategis dilakukan di Pegunungan Kendeng, yang menghasilkan rekomendasi untuk menerbitkan dokumen terkait pertambangan di Pegunungan Karst Kendeng. Dalam konflik lingkungan hidup, label seperti “orang luar” dan “ekstremis” sering digunakan untuk mengisolasi satu sama lain.

Menurut Opatow & Weiss (2000), hal ini merupakan gejala dari orientasi moral yang memandang korban sebagai orang yang tidak layak mendapatkan keadilan, yang pada akhirnya membenarkan dan merasionalisasi kerugian yang menimpa mereka. Namun, mereka percaya bahwa mereka yang berkuasa dan lebih memikirkan perspektif lingkungan hidup bersikeras bahwa keputusan harus mempertimbangkan pemangku kepentingan dan kesejahteraan umum manusia dan alam. Hal ini tidak terjadi pada kasus pembangunan pabrik semen Kendeng. Di sana, pemerintah pusat sebagai pihak yang berkuasa memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk menentukan arah pembangunan tanpa mempertimbangkan kesejahteraan komunitas dan masyarakat setempat. lingkungan sekitar.

2. Dampak yang ditimbulkan dari Pembangunan Pabrik Semen di Pegunungan Kendeng

Industri pertambangan dan semen di Pegunungan Kendeng Utara menimbulkan sejumlah dampak buruk terhadap perekonomian penduduk setempat, serta terhadap lingkungan, kesehatan, sosial, budaya, dan nilai-nilai komunal. Warga Rembang dan pati yang mayoritas berprofesi sebagai petani langsung kehilangan lahan dan pendapatan akibat penambangan batu kapur, kemudian juga karena adanya penambangan batuan kapur yang digunakan sebagai bahan baku semen, dan proses produksi semen. Polusi udara mempengaruhi kesehatan masyarakat dan perekonomian karena merupakan akibat dari operasi penambangan dan pembuatan semen di industri. Selaput tanaman tertutup debu dari pabrik dan tambang sehingga mengganggu kualitas pertumbuhan tanaman dan pakan ternak. Mengingat kesamaan suatu hal yang menjadi

masalah utama yakni aktivitas penambangan batuan kapur dan produksi semen di Pati kemungkinan besar akan menimbulkan dampak lingkungan berupa pencemaran. Belum lagi dampak sosial industri semen dan pertambangan di Rembang dan Pati yang terwujud dalam keretakan kekompakan masyarakat.

Penolakan warga terhadap tindakan perusahaan utamanya disebabkan oleh tidak dilibatkannya warga dalam perencanaan pembangunan industri semen. Dukungan bank terkait erat dengan aktivitas industri semen di Pegunungan Kendeng Utara karena pembiayaan yang mereka tawarkan. Perusahaan jasa keuangan sebenarnya memiliki kebijakan dan janji tertulis untuk mendukung praktik bisnis yang etis dengan mempertimbangkan faktor sosial dan lingkungan, termasuk hak asasi manusia. Akibatnya, karena bertentangan dengan janji dan kebijakan bank, dukungan yang ditawarkan menjadi sasaran kritik dan penilaian. Industri jasa keuangan (SJK), yang memberikan dukungan keuangan, juga bertanggung jawab atas kerusakan yang terjadi pada ekologi, masyarakat, dan budaya masyarakat di Pegunungan Kendeng Utara. Selain bank-bank internasional, beberapa bank domestik juga turut menyumbang aliran dana untuk operasi pertambangan sektor semen di wilayah tersebut antara tahun 2018 dan 2022.

Standar hak asasi manusia (HAM) telah dilanggar oleh aktivitas bisnis industri semen di Pegunungan Kendeng, menurut laporan dari penduduk setempat. Munculnya industri pertambangan dan semen khususnya PT Semen Indonesia, belum ada keterlibatan masyarakat dalam forum konsultasi atau sosialisasi (partisipasi masyarakat). Petani Desa Tegaldowo, mengaku sosialisasi tidak pernah dilakukan dengan benar. Sejak fasilitas tersebut didirikan, rencana tersebut tidak memberikan informasi yang jelas kepada masyarakat. Ia lalu bersama warga meminta klarifikasi kepada Pemerintah Desa, Kecamatan, dan Kabupaten, namun masih belum mendapat jawaban jelas.

PT SG melakukan sosialisasi kolaboratif dengan beberapa individu yang tidak mewakili keinginan seluruh masyarakat setempat di tengah rumor yang menyesatkan mengenai rencana pembangunan pabrik semen. Sekelompok warga kemudian melakukan penelitian komparatif ke Tuban, yang mana di Tuban terdapat industri semen yang sudah mapan, untuk mengetahui pengaruh bisnis semen tersebut. Warga mengetahui dampak buruk industri semen terhadap lingkungan dan mata pencaharian mereka setelah melakukan penelitian komparatif. Sikap menolak keberadaan bisnis semen di Pegunungan Kendeng pun turut hadir di sini. Usulan pembangunan pabrik semen di Pati tidak mengikuti prosedur kerjasama dengan masyarakat setempat. Pasalnya, meski persiapan pembangunan fasilitas masih berjalan, namun mayoritas masyarakat menentang pendirian pabrik semen.

Bagi para petani Baturejo Pati, izin lingkungan seharusnya tidak diberikan karena menurut dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), 67% penduduk setempat menentang pembangunan pabrik semen. Para hakim PTUN di Semarang sebenarnya percaya bahwa 67% warga yang menentang pembangunan industri semen harus dihormati pandangan hidup mereka. Namun, putusan hakim Pengadilan Tinggi Surabaya membatalkan putusan PTUN Semarang. Pasal 26 UU No. 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) menyatakan bahwa keterlibatan masyarakat dalam proses penyusunan rencana pengelolaan lingkungan hidup diperlukan, dan salah satu caranya adalah melalui konsultasi publik yang memadai. Metode konsultasi publik yang tidak tepat ini melanggar ketentuan tersebut.

Hal ini juga didukung oleh PP No. 27/2012, yang mengatur tentang izin lingkungan. Pasal 9 dari dokumen tersebut menjelaskan bagaimana mempersiapkan Amdal yang melibatkan masyarakat yang terkena dampak dan pemerhati lingkungan, dengan konsultasi publik sebagai salah satu platformnya. Kondisi ini membawa kita pada kesimpulan yakni konsultasi secara publik di Rembang dan Pati dilakukan belum tepat dan inkonstitusional, berdasarkan kesaksian masyarakat setempat. AMDAL yang digunakan untuk PT Semen Indonesia yang berlokasi di Rembang sudah tidak berlaku lagi. Karena izin lingkungan yang baru harus didasarkan pada AMDAL yang baru sesuai dengan UU No. 32/2009 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH).

Berikut terdapat penjelasan lebih rinci terkait dampak-dampak yang ditimbulkan dari pembangunan pabrik semen di pegunungan Kendeng :

1) Dampak Bagi Kesehatan dan Lingkungan

a) Pasokan Air Warga Berkurang

Hilangnya akses air bagi penduduk setempat merupakan salah satu dampak yang ditimbulkan dari penambangan pabrik semen di Gunung Kendeng. Beberapa sungai kecil yang mengalir di sepanjang lingkungan pemukiman penduduk mulai mengering. Operasi industri semen juga berdampak pada cekungan air tanah (CAT) yang juga dipakai oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), yang menurunkan debit air. Meskipun Cekungan air tanah di Watu Putih tidak termasuk pada kawasan lindung, beberapa ahli menyatakan bahwa karakteristik CAT Watu Putih mirip dengan kawasan lindung. Oleh karena itu, CAT Watu Putih perlu dilindungi. Meskipun tidak memiliki peruntukan sebagai kawasan lindung, CAT Watu Putih memiliki banyak fitur yang sama dengan kawasan yang seharusnya dilindungi.

Sejumlah ahli juga menyatakan dalam studi berikut, seperti Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Pegunungan Kendeng, bahwa cekungan air tanah seharusnya diklasifikasikan sebagai Bentang Alam Karst. Masyarakat di kawasan Pegunungan Kendeng Utara sangat bergantung pada air untuk menyelesaikan tugas sehari-hari. Tentu saja, air digunakan untuk keperluan ini segera setelah bangun tidur, termasuk mandi, memasak, bersih-bersih, memandikan anak, dan bahkan memberi minum ternak mereka. Pembagian kerja yang terjadi dalam rumah tangga adalah penyebab dari semua kegiatan ini. Air adalah sumber daya vital yang membantu perempuan berpartisipasi dalam angkatan kerja di masyarakat Kendeng. Hal ini menunjukkan bagaimana industri pertambangan dan semen, yang membahayakan pasokan air lokal, juga berdampak pada kesejahteraan sosial dan ekonomi penduduk, terutama terkait kesehatan dan kebutuhan air untuk pertanian dan peternakan.

b) Timbulnya Debu dan Polusi yang Berbahaya

Polusi di hasil dari industri semen dan pertambangan di Rembang dan Pati. Operasi penambangan, proses produksi pabrik, dan mobilitas pertambangan semuanya berkontribusi terhadap polusi udara. Debu mempengaruhi sistem pernapasan dan penglihatan manusia, sehingga sangat berbahaya bagi anak-anak dan orang tua. Selain itu, pergerakan truk pengangkut mengumpulkan dan menyebarkan debu dari batu kapur yang diangkut, sehingga menimbulkan risiko kecelakaan bagi masyarakat sekitar karena kemungkinan muatan truk jatuh. Tingkat kenyamanan tinggal di dalam rumah juga menurun akibat debu dari kegiatan produksi semen. Warga mengalami pilek, batuk, mata perih, dan sesak napas. Selain debu, warga juga terkena dampak kebisingan dan getaran dari ledakan dan pergerakan kendaraan.

Pengguna jalan raya juga terancam oleh truk-truk yang mengangkut bahan baku semen yang melewati daerah pemukiman karena jika terjatuh dapat menyebabkan kecelakaan. Kemampuan kendaraan untuk memindahkan bahan baku semen semakin terhambat oleh rute yang sering digunakan oleh penduduk setempat untuk mengakses daerah tersebut. Selain itu, getaran yang terjadi menyebabkan keretakan dan kerusakan lain pada tempat tinggal sejumlah warga. Berdasarkan hasil wawancara, diketahui bahwa operasi industri semen dan pertambangan tidak dilakukan dengan cara yang dapat melindungi kesehatan dan keselamatan penduduk setempat.

c) **Terganggunya Kesehatan Mental pada Perempuan**

Secara umum, perempuan secara aktif berpartisipasi dalam mengelola pertanian, pangan, dan kelestarian lingkungan, serta secara aktif terlibat dalam fungsi reproduksi dan pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Karena faktor-faktor tersebut, keterlibatan perempuan dalam masalah lingkungan tidak dapat dibatasi hanya di rumah, tempat kerja, atau domain domestik lainnya. Dalam konteks tantangan lingkungan, agensi perempuan dan relasi gender dibentuk oleh partisipasi aktif mereka dalam domain-domain tersebut. Akibatnya, modifikasi di salah satu bidang ini dapat memengaruhi bagaimana perempuan menjalankan peran mereka sebagai pemain gender dalam kemitraan.

Kegiatan pertambangan dan bisnis yang berkaitan dengan semen di Rembang dan Pati juga memiliki dampak psikologis terhadap perempuan. Stres disebabkan oleh beban yang ditanggung perempuan terkait dampak pertambangan terhadap lingkungan, kesehatan fisik, dan urusan rumah tangga. Seorang ibu rumah tangga pernah bunuh diri akibat tekanan yang dialaminya. Oleh karena itu, kehadiran bisnis dan operasi semen berkontribusi secara signifikan terhadap masalah kesehatan mental pada perempuan dan meningkatkan kerentanan mereka terhadap bahaya kesehatan.

2) Dampak Sosial atau Budaya Masyarakat

a) **Keretakan Sosial Antar Warga**

Pertambangan dan industri semen memiliki dampak tidak langsung terhadap perpecahan sosial, berbeda dengan dampak nyata terhadap lingkungan dan ekonomi. Warga yang menentang bisnis semen dan mereka yang mendukungnya menjadi lebih dekat. Terjadi kesenjangan sosial di Pati dan Rembang. Hingga saat ini, kesenjangan sosial tersebut semakin mengeras (bersifat laten dan terus-menerus). Perbedaan pendapat warga mengenai industri semen – antara yang mendukung dan yang menentang – membantu stabilitas ini. Sebelumnya ditopang oleh budaya yang saling mendukung, kohesi sosial bersifat inklusif, tetapi sekarang terpecah.

Pada kenyataannya, konflik sosial dimulai dari tingkat rumah tangga dan berkembang menjadi kasus perceraian sebagai akibat dari perbedaan pendapat mengenai bisnis semen di Rembang. Kegiatan-kegiatan sosial sehari-hari yang dulunya menunjukkan kohesivitas sosial di Desa Tegaldowo, Rembang, kini justru menjadi sumber keretakan sosial. Misalnya, pengajian tidak lagi dilakukan secara serempak, kebiasaan bertegur sapa dengan tetangga menghilang antara yang menerima dan yang menentang, dan pertemuan kelompok pemuda tidak lagi seramah dulu terhadap pembangunan pabrik semen.

b) **Lunturnya Tradisi atau Budaya Masyarakat**

Selain menurunnya rasa kasih sayang antarpribadi, industri semen juga mempengaruhi norma-norma budaya masyarakat. Salah satu contohnya adalah menurunnya tradisi brokhan, karena tidak ada lahan yang cukup untuk mengadakan upacara oro-oro-sebuah upacara pelepasan sapi-di sana. Selain brokohan, tradisi lain

yang hampir punah adalah pisoanan, di mana orang-orang bertemu untuk membicarakan masalah-masalah yang berkaitan dengan tanah tempat sapi merumput. Karena termasuk mengekspresikan penghargaan kepada alam semesta, tradisi brokohan dan pisoanan dianggap oleh penduduk setempat sebagai ritual keagamaan dan bukan sekadar kegiatan artistik. Adat istiadat setempat juga telah berkurang setelah adanya industri semen.

Secara tradisional, masyarakat merayakan brokohan, atau syukuran, dengan berbagi makanan di ladang pada waktu-waktu tertentu. Setelah itu, masyarakat melakukan selamatan dengan melepaskan sapi ke ladang yang dikenal sebagai oro-oro, di mana sapi-sapi tersebut dibersihkan, diberi minyak, dikalungi ketupat, dan dibiarkan merumput untuk mengantisipasi musim tanam. Namun, saat ini, brokohan tidak memiliki lahan yang dapat digunakan sebagai oro-oro untuk pertemuan masyarakat, namun hal ini dapat dilakukan dengan jumlah peserta yang sedikit.

3) Dampak Ekonomi

a) Debu mengganggu kesuburan tanaman dan ternak warga

Perekonomian dan kesehatan masyarakat terkena dampak pencemaran udara ini. Dari segi perekonomian, tanaman pertanian rakyat tertutup debu pertambangan sehingga menurunkan kesuburannya. Selain itu, rumput yang biasa digunakan warga sebagai pakan ternak juga tertutup debu. Akibatnya, kualitas hasil panen menurun, dan para petani terpaksa mengeluarkan biaya lebih tinggi untuk membeli pakan ternak—yang sebelumnya tersedia secara bebas di alam. Tingginya jumlah debu akibat aktivitas peledakan dan peledakan juga turut berkontribusi terhadap menurunnya hasil panen masyarakat setempat.

Pergerakan kendaraan yang membawa bahan baku sejak pabrik semen didirikan, mengganggu pertumbuhan tanaman yang ditanam penduduk setempat. Selain mengganggu aktivitas pertanian di sekitar lokasi penambangan, aksi peledakan juga membahayakan keselamatan warga karena bebatuan yang beterbangan. Selain itu, dampaknya adalah masyarakat terpaksa membudidayakan pakan ternaknya sendiri dibandingkan memperolehnya dari alam secara berkelanjutan. Akibatnya, para peternak kini harus mengeluarkan lebih banyak uang dan tenaga untuk mengelola bisnis peternakan mereka.

b) Berkurangnya Lahan Pertanian Masyarakat Sekitar

Luas lahan yang dikelola warga, baik milik sendiri maupun milik bersama, akan berkurang akibat rencana pembangunan industri semen hingga berfungsi secara efisien. Lahan milik warga tersebut mula-mula dibeli oleh sejumlah oknum yang belum jelas niatnya. Meskipun harga tanah pada saat itu rendah, terdapat tekanan dari pejabat setempat yang tidak jujur dan rumor bahwa tanah yang tidak dijual mungkin akan ditimbun dan kemudian dilepaskan. Selain itu, kedekatan lokasi tambang dengan lahan pertanian juga menyebabkan penurunan produksi sehingga memaksa masyarakat yang sebelumnya tidak menjual lahannya untuk menyerahkan lahan tersebut. Karena lahan Perhutani digunakan untuk industri semen yaitu pabrik semen dan pertambangan wilayah tersebut semakin menyusut. Tentu saja berkurangnya luas lahan yang dikelola berdampak pada menurunnya kuantitas hasil pertanian yang dihasilkan.

c) Tuntutan Peralihan Profesi Dan Hilangnya Mata Pencaharian Warga

Masyarakat Pati yang menentang pabrik semen menganggap penambangan skala besar dan pembangunan pabrik semen akan mempersulit mereka untuk bertahan hidup sebagai petani. Selain ketakutan mereka terhadap perampasan lahan, mereka juga khawatir akan adanya timbul berbagai dampak negatif terhadap menurunnya kinerja lahan pertanian yang masih tersisa serta berdampak juga terhadap lingkungan. dan

menurunkan produktivitas lahan pertanian yang tersisa. Direktur LBH Semarang mencatat bahwa perubahan dalam cara masyarakat memenuhi kebutuhan dasarnya akan mempengaruhi kelayakan hidup mereka, dan hal ini berdampak pada banyaknya pelanggaran hak atas pekerjaan, hak atas tanah dan hak atas penghidupan. Pelanggaran tersebut disebabkan oleh industri pertambangan dan semen di Rembang dan Pati. Tidak sepenuhnya tepat jika dikatakan bahwa PT Semen Indonesia akan meningkatkan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.

Menurut argumen masyarakat setempat bahwa hanya dibutuhkan 600 pekerja untuk AMDAL PT Semen Indonesia, dimana 150 pekerja dibutuhkan untuk pembangunan pabrik dan 400 sisanya adalah pekerja terampil dengan minimal ijazah sekolah menengah atas. Pernyataan bahwasanya PT Semen Indonesia akan menyerap tenaga kerja lokal terbantahkan oleh fakta bahwa rata-rata tingkat pendidikan penduduknya adalah lulusan sekolah dasar jika dibandingkan dengan demografi desa-desa terdekat. Dampak ekologis dari operasional industri semen dirasakan oleh warga Kendeng yang bergantung pada pertanian di Rembang dan Pati. Pegunungan Kendeng menopang keberadaannya dan sebagai tempat resapan air, sedikit demi sedikit rusak akibat aktivitas pertambangan.

Kesimpulan

Dengan pesatnya perkembangan di Indonesia, permintaan pasar semen semakin naik setiap tahunnya. Hal tersebut dapat berdampak pada peningkatan permintaan bahan baku semen. PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk, yang merupakan bagian dari badan usaha milik negara dibidang itu, berencana membangun pabrik semen di kawasan Watuputih. Masyarakat menyadari bahwa penambangan yang dilakukan di Pegunungan Kendeng akan berdampak pada tata air yang merupakan sumber air sehari-hari dan sumber perekonomian sektor pertanian. Perlawanannya terbuka dan berani serta menjunjung tinggi prinsip-prinsip non-kekerasan. Pada akhirnya, izin lingkungan yang dikeluarkan gubernur menjadi isu besar sehingga menimbulkan perselisihan antara pemerintah dan ilmuwan.

Pembangunan pabrik semen Indonesia yang berlokasi di Kabupaten Pati, serta Penambangan baru kapur di Rembang sudah jelas menimbulkan berbagai dampak bagi kehidupan masyarakat, lingkungan, dan lainnya. Dalam aspek lingkungan dan kesehatan menimbulkan dampak yaitu pasokan air warga berkurang, adanya debu dan polusi yang buruk, kemudian juga mengganggu kesehatan mental perempuan. Dampak pada aspek sosial atau budaya masyarakat diantara-Nya Keretakan sosial antar warga, luntarnya budaya tradisi dan budaya yang ada di masyarakat. Terakhir, dari sisi aspek ekonomi menimbulkan dampak mengganggu kesuburan dan ternak warga, berkurangnya lahan pertanian masyarakat sekitar, dan tuntutan alih profesi serta hilangnya mata pencaharian warga.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, 2004, Hukum dan Penelitian Hukum , Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm 134.
- Bambang Waluyo, 2002, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 15.
- Harja, I. T., Arif, A. S., Armintasari, F., Ningrum, D. R., Djamhari, E. A., Ramdlaningrum, H., & Prasetya, D. (2022). Pelanggaran Hak Warga dan Tanggung Jawab Bank dalam Pembiayaan Industri Semen di Pegunungan Kendeng Utara. Perkumpulan PRAKARSA.

- Huwaina, A., Prabawati, A., & Dewi, A. (2024). Konflik pembangunan pabrik semen di pegunungan Kendeng, Jawa Tengah (Analisis konflik tenurial menggunakan teori konflik karl marx). *Environment Conflict*, 1(1).
- Karega, D. A. (2018). Dampak Pembangunan Pabrik Semen Bagi Kehidupan Masyarakat di Pegunungan Kendeng (Studi Kasus Kabupaten Pati, Jawa Tengah).
- Parise, M., Closson, D., Gutiérrez, F., & Stevanović, Z. (2015). Anticipating and managing engineering problems in the complex karst environment. *Environmental Earth Sciences*, 74, 7823-7835.
- Purnaweni, H. (2014). Kebijakan Pengelolaan Lingkungan di Kawasan Kendeng Utara Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal ilmu lingkungan*, 12(1), 53-65.
- Solihin, M., & Kurnia, N. (2017). Pemaknaan Konflik Pabrik Semen Kendeng dalam Framing Media Berita Online kompas. Com dan suara merdeka. Com. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 15(1), 16-27.
- Song, H. (2020). Perceived standing: exploring why people accept or reject others' access to public participation in local environmental conflicts. *Local Environment*, 25(5), 397-413.
- Suharko, S. (2017). Masyarakat Adat versus Korporasi: Konflik Sosial Rencana Pembangunan Pabrik Semen di Kabupaten Pati Jawa Tengah Periode 2013-2016. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 20(2), 97-116.
- Suharsimi Arikunto, 2012, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta, Rineka Cipta, hl. 126.